

TINGKAT KERAWANAN PANGAN WILAYAH KABUPATEN TUBAN

Rini Mutisari^{1*}, Rosihan Asmara¹, Fahriyah¹

¹ Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

PENDAHULUAN

Sumberdaya manusia yang berkualitas menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Sedangkan pembangunan suatu bangsa tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh tercukupinya pemenuhan kebutuhan dasar terutama masalah pangan. Sehingga keberhasilan pembangunan suatu bangsa dicerminkan oleh kondisi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Secara teori ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (Nugroho, 2015 dan Hanani, 2015). Konsekuensinya adalah negara harus hadir dalam menyediakan pangan bagi masyarakatnya secara cukup dan merata. Hal ini dicerminkan oleh UU Pangan No 18 Tahun 2012, yang memberikan kewenangan dan tugas kepada negara untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Badan Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat mengalami kekurangan energi dan protein meskipun ketersediaan energi dan protein nasional sudah mencapai kebutuhan. Hal ini bisa diamati dari data tahun 2014 yang menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia 1.949 kkal/kap/hari sementara untuk konsumsi protein mencapai 56,64 gram/kap/hari. Padahal ketersediaan energi dan protein di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 4.130 kkal/kap/hari, sementara untuk protein sebesar 87,04 gram/kap/hari. Munculnya gap antara ketersediaan dan konsumsi energi dan protein masyarakat ini bisa disebabkan oleh: 1) kurangnya akses fisik bagi individu untuk memperoleh pangan yang cukup, yang dicontohkan dengan tidak sesuainya daya beli masyarakat dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal; 2) dan kurangnya pemanfaatan pangan serta informasi pemanfaatan pangan.

Berdasarkan uraian di atas maka analisis terhadap indikator ketahanan pangan menjadi sangat penting dilakukan. Hal ini juga didukung beberapa alasan, *pertama* output yang dihasilkan akan lebih mudah diidentifikasi pada titik-titik kerawanan pangan sampai tingkat desa/kelurahan, *kedua* mempermudah *updating* data sehingga perubahan aspek ketahanan pangan dapat diketahui dari waktu ke waktu dalam rangka evaluasi dan pemantauan ketahanan pangan suatu wilayah, *ketiga* dapat diketahuinya secara mudah permasalahan yang muncul dan menjadi penyebab kerawanan pangan suatu wilayah (desa/kelurahan). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerawanan pangan wilayah Kabupaten Tuban.

METODE PENELITIAN

Data diambil pada 328 kelurahan/desa di Kabupaten Tuban. Data ditransformasi berdasarkan indikator dan kriteria kerawanan pangan yang telah ditentukan. Indikator diseleksi dengan metode *principal component*. Indikator terpilih selanjutnya dianalisis menggunakan metode komposit (Nugroho, 2015). Indikator yang diukur dibagi kedalam 3 aspek kerawanan pangan, yaitu:

1. Aspek Ketersediaan Pangan
 - a. Rasio Konsumsi Normatif yaitu: konsumsi pangan normatif dibagi dengan ketersediaan domestik.
 - b. Rasio Pelayanan Toko yaitu: jumlah toko per 100 KK.
 - c. Persentase Lahan Tidak Beririgasi yaitu: luas lahan pertanian dikurangi luas lahan pertanian beririgasi dalam bentuk persentase.
2. Aspek Akses Pangan
 - a. Persentase RT Tidak Akses Listrik, yaitu: jumlah rumah tangga dikurangi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dalam persentase
 - b. Persentase KK Berumah Bambu, yaitu: jumlah KK yang berumah bambu dalam bentuk persentase
 - c. Persentase Penduduk Tidak Tamat SD
3. Aspek Penyerapan Pangan
 - a. Angka Kematian Bayi (IMR), yaitu: jumlah kematian bayi per jumlah kelahiran dikalikan 1000.
 - b. Persentase Penduduk Tidak Akses Air bersih, yaitu: jumlah RT akses air bersih dikurangi jumlah RT menggunakan sumur, PAM, sumber air terlindungi per jumlah RT dalam persentase.
 - c. Persentase Balita Gizi kurang, yaitu: jumlah balita per jumlah balita gizi kurang dalam persentase.

Indek indikator dibentuk dari koefisien trend regresi masing-masing indikator kerawanan pangan. Indeks yang disusun per indikator memiliki keseragaman pengukuran sebagai berikut:

Sangat rawan	→	>= 0.80
Rawan	→	> 0.64 – 0.80
Agak Rawan	→	> 0.48 – 0.64
Cukup Tahan	→	> 0.32 – 0.48
Tahan	→	> 0.16 – 0.32
Sangat Tahan	→	<= 0.16

Selanjutnya untuk menghitung nilai komposit tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Tuban diperoleh dengan metode rata-rata, yaitu:

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{n}$$

Dimana:

Y = tingkat kerawanan pangan desa/kelurahan

I_i = nilai indeks indikator ke-i

n = jumlah indikator

HASIL DAN PEMBAHASAN

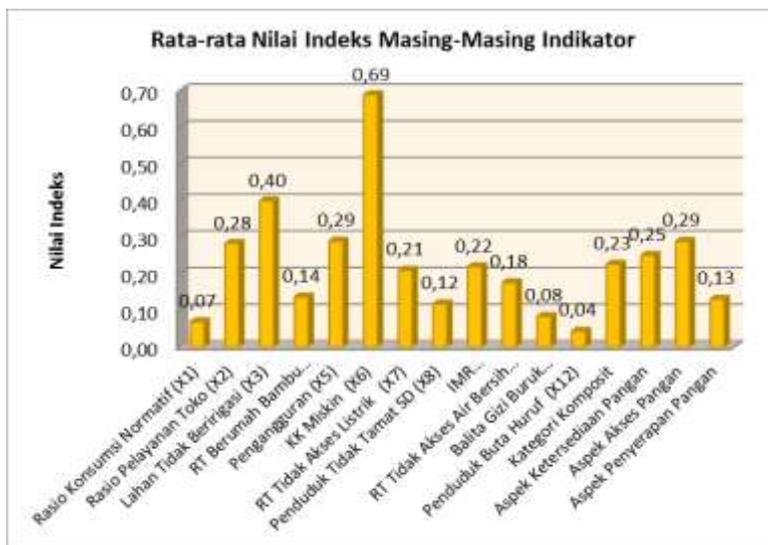
Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tuban berdasarkan indikator komposit disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Indikator Komposit

No.	Kategori	Jumlah Desa/Kelurahan	Persentase (%)
1	sangat tahan	75	22.87
2	Tahan	207	63.11
3	cukup tahan	45	13.72
4	agak rawan	1	0.30
5	Rawan	0	0.00
6	sangat rawan	0	0.00
Total		328	100.00

Sumber: Data Sekunder, 2015 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan indeks komposit kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang baik, dimana hampir semua desa/kelurahan berada dalam kondisi tahan dan hanya satu desa/kelurahan yang terkategori agak rawan. Adapun jumlah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori sangat tahan 21.34%, kategori tahan 65.24%, dan kategori cukup tahan 13.41%.



Gambar 1. Rata-rata Nilai Indeks Masing-masing Indikator Kerawanan Pangan

Sumber: Data Sekunder, 2015 (Diolah)

Hasil yang cukup baik terlihat pada indikator-indikator pada Aspek Ketersediaan Pangan dan Aspek Penyerapan Pangan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa tidak ada satupun indikator dari kedua aspek tersebut yang tergolong dalam kategori rawan (indeks > 0.48). Hanya saja pada aspek ketersediaan pangan indikator yang memiliki kinerja terburuk adalah lahan tidak beririgasi (0.40), sedangkan pada aspek penyerapan pangan adalah indikator IMR (0.22). Secara terperinci nilai indeks masing-masing indikator kerawanan pangan disajikan pada Gambar 1.

Sementara itu indikator yang menunjukkan hasil yang buruk pada Aspek Akses Pangan adalah indikator KK Miskin. Nilai indeks dari indikator ini adalah 0,69 artinya hal ini menunjukkan bahwa rata-rata desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tuban berdasarkan indikator KK miskin berada dalam kondisi yang rawan. Secara teoritis indikator kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Dengan demikian ketika kemiskinan menjadi masalah utama di Kabupaten Tuban, maka diasumsikan bahwa tingkat daya beli masyarakat di wilayah ini juga terbatas. Sehingga pada akhirnya akan rentan mengalami masalah kerawanan pangan.

Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Tiga Aspek Kerawanan Pangan

No.	Kategori	Aspek Ketersediaan Pangan		Aspek Akses Pangan		Aspek Penyerapan Pangan	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	sangat tahan	132	40.24	68	20.73	201	61.28
2	tahan	56	17.07	145	44.21	100	30.49
3	cukup tahan	106	32.32	77	23.48	19	5.79
4	agak rawan	19	5.79	29	8.84	7	2.13
5	rawan	14	4.27	9	2.74	1	0.30
6	sangat rawan	1	0.30	0	0.00	0	0.00
	Total	328	100.00	328	100.00	328	100.00

Sumber: Data Sekunder, 2015 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar desa/kelurahan masuk dalam kategori tahan pangan. Namun demikian untuk masing-masing aspek masih ada beberapa desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rawan pangan. Pada Aspek Ketersediaan Pangan terdapat 5.79% desa/kelurahan yang terkategori agak rawan, 4.27% desa/kelurahan terkategori rawan, dan 0.30% desa/kelurahan terkategori sangat rawan. Sementara itu pada Aspek Akses Pangan terdapat 8.84% desa/kelurahan terkategori agak rawan, dan 2.74% desa/kelurahan terkategori rawan. Adapun pada Aspek Penyerapan Pangan hanya terdapat 2.13% desa/kelurahan terkategori agak rawan dan 0.30% desa/kelurahan terkategori rawan.

Faktor yang mempunyai kecenderungan menjadi penyebab desa/kelurahan masuk dalam kategori rawan bisa dilihat pada nilai indeks masing-masing indikator pada Gambar 1. Pada gambar tersebut bisa diketahui bahwa indikator yang mempunyai nilai indeks tertinggi adalah indikator KK Miskin dari Aspek Akses Pangan dengan nilai 0.69 (rawan). Hal ini berarti bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan desa/kelurahan di

Kabupaten Tuban masuk dalam kategori rawan. Adapun pada Aspek Ketersediaan Pangan dan Aspek Penyerapan Pangan semua indikator menunjukkan hasil yang baik karena nilai indeksinya < 0.48 . Namun demikian dari dua aspek tersebut indikator yang mempunyai nilai indeks tertinggi dan mempunyai kecenderungan menyebabkan rawan pangan adalah Indikator Lahan Tidak Beririgasi dengan nilai indeks 0.40 dan Indikator IMR (*Infant Mortality Rate*) dengan nilai indeks 0.22.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tuban berdasarkan indeks komposit menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata indeks komposit sebesar 0.23 yang artinya tahan. Adapun jika dilihat kondisi ketahanan pangan per aspeknya, maka pada Aspek Ketersediaan Pangan mempunyai nilai indeks 0.25 yang artinya tahan, Aspek Akses Pangan mempunyai nilai indeks 0.290 (tahan), dan Aspek Penyerapan Pangan mempunyai nilai indeks 0.130 (sangat tahan).

Hasil analisis berdasarkan indeks komposit menunjukkan bahwa tidak ada satupun desa/kelurahan yang termasuk dalam kategori rawan. Sementara itu berdasarkan hasil analisis pada Aspek Ketersediaan Pangan menunjukkan bahwa terdapat 19 desa yang termasuk dalam kategori agak rawan, 14 desa yang termasuk dalam kategori rawan, dan satu desa dalam kondisi sangat rawan. Pada Aspek Penyerapan Pangan terdapat 29 desa dalam kondisi agak rawan, dan 9 desa dalam kondisi rawan. Adapun berdasarkan Aspek Penyerapan Pangan terdapat 7 desa dalam kondisi agak rawan, dan 1 desa dalam kondisi rawan.

Hal yang menjadi penyebab terjadinya kerawanan pangan dari aspek ketersediaan pangan adalah tingginya persentase lahan tidak beririgasi, dari aspek akses pangan adalah tingginya angka kemiskinan dan pada penyerapan pangan adalah masih ditemukannya kasus kematian bayi.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan domestik adalah perlu dilakukan upaya perbaikan produktivitas lahan dengan memperbaiki infrastruktur irigasi. Merujuk pada hasil penelitian dimana kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab kerawanan pangan, maka program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Tuban harus ditingkatkan. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta edukasi kepada ibu hamil perlu dilakukan untuk mengurangi kasus bayi mati.

REFERENSI

- Hanani, N. 2012. Strategi Enam Pilar Pembangunan Ketahanan Pangan. Disampaikan pada rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya pada 24 April 2012. Malang.
- Kementerian Pertanian. 2016. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015. (tersedia di http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/LAPORAN_TAHUNAN_2015.pdf).
- Nugroho, Condro Puspo. 2015. Analisis Indikator Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo. *Agrise*, XV (3): 166-181.

